

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Konsep Efektivitas

Efektivitas diartikan sebagai keberhasilan atas usaha dan tindakan. Organisasi pemerintah yang orientasinya adalah pelayanan pada masyarakat (*public service*), maka keberhasilan dapat diartikan suatu dayaguna dan hasil guna dari setiap pelayanan yang diberikan. Sebagai bagian dari program pembangunan dirancang antara lain untuk menyajikan informasi yang menentukan bagi para perencana program, kemudian dapat untuk menyusun proyek-proyek lain, dan dapat dirancang sebagai kegiatan-kegiatan berkelanjutan (*sustainable*).

Suatu organisasi dapat dikatakan berhasil atau efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya, selanjutnya untuk menentukan apakah organisasi dapat dikategorikan berhasil, terdapat beberapa kriteria. Berdasarkan kriteria tersebut dapat diukur sejauhmana organisasi mencapai tujuannya.

Menurut teori Prasetya (2004:6) sesuatu organisasi dikatakan efektif bila unsur dari organisasi merasa puas. Akhir-akhir ini berkembang suatu teori atau pandangan yang lebih komprehensif dan paling umum dipergunakan dalam membahas persoalan efektivitas organisasi adalah kriteria *flexibility*, *productivity* dan *satisfaction*.

Stoner (1982:6), menekankan pentingnya efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan

suatu organisasi. Sharma (1982:9), kriteria atau ukuran suatu efektivitas dapat dinilai dari produktivitas organisasi atau output, fleksibilitas organisasi dan bentuk keberhasilannya dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi, serta dari ada tidaknya ketegangan dalam organisasi atau hambatan- hambatan/konflik di antara bagian-bagian organisasi.

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi. Apabila organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut telah berjalan efektif. Berdasarkan pendapat Steers (1985:2), organisasi merupakan suatu kesatuan yang kompleks yang berusaha untuk mengalokasikan sumber dayanya secara rasional demi tercapainya tujuan. Dalam meneliti efektivitas suatu organisasi, maka sumber daya manusia dan perilaku manusia senantiasa menjadi pusat perhatian dan usaha-usaha meningkatkan efektivitas haruslah selalu dimulai dengan meneliti perilaku di tempat kerja.

Pengertian efektivitas organisasi menurut Steers (1985:235) dapat dijelaskan dengan memahami 3 (tiga) konsep yang saling berhubungan, yaitu:

1. Optimasi Tujuan, dalam optimasi tujuan keberhasilan yang tercapai oleh suatu organisasi tergantung dari kemampuannya untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber dayanya yang langka dan berharga serta sependai mungkin dalam usahanya mengejar tujuan operasi dan kegiatannya. Dalam hal ini organisasi harus mengatasi hambatan yang dapat menghalangi tercapainya tujuan dan mencari alternatif terbaik guna mencapai tujuan organisasi secara optimal.
2. Perspektif Sistem, dalam perspektif sistem organisasi dari dari berbagai unsur yang saling mendukung dan saling melengkapi. Unsur-unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap proses pencapaian tujuan organisasi.
3. Tekanan pada Segi Perilaku Manusia, dalam perilaku manusia, tingkah laku individu dan kelompok menentukan kelancaran tercapainya tujuan suatu organisasi.

Efektivitas selalu berkaitan dengan tolak ukur atau penilaian yang digunakan. Seperti yang dikemukakan oleh Argyris (dalam Steers, (1985:58) bahwa efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan pemecahan dan pemanfaatan tenaga manusia. Berarti dalam menilai efektivitas maka tolak ukur yang digunakan adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal upaya pencapaian tujuan.

Georgopoulos dan Tannenbaum (dalam Steers, 1980:60), mengemukakan bahwa efektivitas organisasi adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi yang merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan dengan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa efektivitas sangat tergantung kepada keberhasilan terhadap suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan.

Kriteria efektivitas dapat dinilai dan dilihat dari keefektivan organisasi itu sendiri menurut dimensi waktu (Suwanto, 1999 : 11), dibagi atas ukuran waktu sebagai berikut :

1. Jangka Pendek, ialah kriteria untuk menunjukkan hasil tindakan yang mencakup waktu satu tahun atau lebih.
2. Jangka Menengah, ialah kriteria yang ditetapkan apabila menilai keefektivan seseorang, kelompok atau organisasi dalam jangka waktu yang lebih lama (misalnya lima tahun).
3. Jangka Panjang, ialah kriteria untuk menilai waktu yang akan datang yang tak terbatas.

Dalam kaitannya dengan model dimensi waktu efektivitas jangka pendek dan jangka menengah, ada lima kategori umum kriteria efektivitas organisasi, yaitu :

1. *Produksi*, yaitu kriteria keefektivan produksi mengacu pada ukuran keuaran utama organisasi.
2. *Efisiensi*, mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi, efisiensi diukur mebururt rasio (perbandingan)
3. *Kepuasan*, sebagai salah satu kriteria keefektivan, kepuasan menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan anggotanya. Cakupan dari kepuasan ini dapat dilihat pada sikap anggota organisasi, pergantian anggota, keluhan dan sebagainya.
4. *Keadaptasian*, adalah suatu ukuran respon atau tanggapan organisasi terhadap tuntutan perubahan. Jika pada tingkatan tertentu organisasi tidak mampu beradaptasi, maka akan mengancam kelangsungan hidup organisasi tersebut.
5. *Pengembangan*, adalah untuk mengukur tanggungjawab organisasi dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang.

Pengukuran atau penilaian terhadap efektivitas suatu organisasi juga dapat digunakan untuk menilai efektivitas dari salah satu fungsi organisasi yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai suatu pengelolaan terhadap suatu bidang tugas organisasi.

Pendapat Emitai Ezioni yang dikutip Indrawijaya (2000:227), mengemukakan pendekatan pengukuran efektivitas organisasi yang disebutnya SYSTEM MODEL, mencakup empat kriteria, yaitu :

1. Adaptasi, yaitu dipersoalkan kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
2. Integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.

3. Motivasi, yaitu pengukuran mengenai keterikatan dan hubungan antara pelaku organisasi dengan organisasinya dan kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
4. Produksi, yaitu usaha pengukuran efektivitas organisasi dihubungkan dengan jumlah dan mutu keluaran organisasi serta insensitas kegiatan suatu organisasi.

Pencapaian hasil (efektivitas) yang dilakukan oleh suatu organisasi menurut Jones (1994:85) terdiri dari tiga (3) tahap, yakni input, conversion dan output atau masukan, perubahan dan hasil. Input meliputi sumber daya yang dimiliki, informasi dan pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal. Tahapan input, tingkat efisiensi sumber daya yang dimiliki sangat menentukan kemampuan yang dimiliki. Tahap conversion ditentukan oleh kemampuan organisasi memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, manajemen dan penggunaan teknologi agar dapat menghasilkan nilai. Tahapan ini, tingkat keahlian SDM dan daya tanggap organisasi terhadap perubahan lingkungan sangat menentukan tingkat produktivitasnya. Tahap output, pelayanan yang diberikan merupakan hasil dari penggunaan teknologi dan keahlian SDM. Organisasi yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efisien dapat meningkatkan kemampuannya untuk pelayanan dengan memuaskan kebutuhan pelanggan.

Steers (1985:206), ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai atau mengukur suatu efektivitas, yaitu :

1. Kemampuan menyesuaikan diri
2. Produktivitas organisasi
3. Kepuasan kerja
4. Kemampuan berlaba
5. Pencarian dan pemanfaatan sumber daya manusia.

Dari beberapa pandangan yang dikemukakan oleh para ahli tentang pengertian dan kriteria efektivitas organisasi diatas, maka dalam melakukan pengukuran terhadap efektivitas organisasi di Kecamatan Somba Opu penulis menggunakan kriteria efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Steers. Alasan penulis menggunakan kriteria yang dikemukakan oleh Steers karena dari kriteria yang disebutkan dapat mewakili semua pandangan yang dikemukakan oleh para ahli.

Namun dari kriteria yang dikemukakan oleh para ahli penulis hanya menggunakan 3 kriteria untuk mengukur efektivitas organisasi di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang tertuang dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 6 Tahun 2010 tentang tujuan kegiatan pelaksanaan program pelayanan publik yaitu program Alokasi Dana Kelurahan (ADK) :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

Perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang merupakan unit terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis keberhasilan program pembangunan.

Teori atau model efektifitas pelaksanaan program pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan oleh Azhar (2004:51) terdiri dari :

1. Model tujuan rasional seperti pengukuran efektifitas sebagaimana teori Weber yang mengatakan bahwa birokrasi merupakan alat bagi pencapaian tujuan masyarakat melalui tindakan yang diatur secara rasional.
2. Model hubungan manusia seperti pengukuran tentang kepemimpinan dan perilaku organisasi pada umumnya.

3. Model sistim terbuka, yaitu pengukuran yang didasarkan pada asumsi bahwa organisasi tergantung pada pertukaran antara pelayanan atau barang yang dihasilkan oleh organisasi dengan lingkungan agar bisa bertahan.
4. Model proses internal, yaitu pengukuran bahwa efektifitas proses internal menurut persepsi partisipan dalam simulasi organisasi dianggap sebagai suatu yang penting dalam seluruh tahapan perkembangan organisasi tersebut.

Model tujuan rasional menekankan kepada perumusan tujuan, perencanaan, evaluasi dan produktivitas. Kelebihan model ini dalam mengevaluasi efektifitas organisasi adalah karena penilaian keberhasilan organisasi dilakukan atas dasar keinginan organisasi, bukan berdasarkan penilaian atas dasar kriteria pribadi (*value judgment*) si penilai. Dilain pihak pendekatan yang berdasarkan tujuan ini diragukan obyektivitasnya, karena kenyataan sebagian besar organisasi mempunyai tujuan yang saling bertentangan dan tujuan resmi biasanya tidak jelas.

Model hubungan manusia adalah model yang menekankan pada moril karyawan, kepemimpinan, pengembangan sumber daya manusia dan aspek peranan informal dari perilaku organisasi. Kekuatan model ini yang utama adalah bahwa organisasi diperlakukan sebagai manusia. Tidak semata-mata sebagai salah satu faktor produksi (Azhar, 2004:89).

Model sistim terbuka, didasarkan pada asumsi bahwa organisasi tergantung pada pertukaran antara “pelayanan atau barang” yang dihasilkan oleh organisasi tersebut dengan lingkungan agar bisa bertahan (*survival*). Silverman (Azhar, 2004:89). Model sistim terbuka memfokuskan pada hubungan antara organisasi dan lingkungan. Secara teoritis, model ini lebih komprehensif dari pada

model-model yang lain, sebab organisasi dianggap sebagai suatu yang dinamis dalam kerangka lingkungan yang luas (Azhar, 1993 : 90).

b. Kemampuan Lembaga Kemasyarakatan

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan mutlak memerlukan kelembagaan sesuai kebutuhan dengan diperkuat suatu aturan dan dirinci dengan suatu peraturan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dikelurahan dapat berjalan dengan tertib dan aman.

Siagian (1997:17) pelaksanaan program pembangunan adalah pemanfaatan sumberdaya dan sumberdana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat waktunya. Berarti pelaksanaan program pembangunan sebagai orientasi kerja menyoroti empat hal yaitu :

1. Sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang digunakan sudah ditentukan dan dibatasi.
2. Jumlah dan mutu barang atau jasa yang harus dihasilkan telah ditentukan.
3. Batas waktu untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut sudah ditetapkan.
4. Tata cara yang harus ditempuh untuk menyelesaikan tugas telah dirumuskan.

Keadaan atau hasil Kerja yang dilakukan oleh manusia memberikan guna yang diharapkan. Dalam psikologi industri untuk menilai apakah tercapainya pelaksanaan program pembangunan pada umumnya dipakai empat pertimbangan yaitu :

1. Pertimbangan ekonomi misalnya jumlah atau mutu hasil;

2. Pertimbangan psikologis misalnya terhadap kesehatan karyawan atau banyaknya kecelakaan jasmani,
3. Pengaruh kerja terhadap rasa letih, kesenadaan atau kekuasaan karyawan terhadap kerja itu;
4. Pertimbangan sosial misalnya kedudukan masyarakat atau kebahagiaan dan penyesuaian diri di dalam kehidupan keluarga.

Pengertian pelaksanaan program pembangunan tersebut nampak lebih luas dan memiliki kriteria yang beragam pula dalam memandang efektifitas yaitu dapat dilihat dari sudut ekonomi, psikologi dan social. Olehnya itu, pengertian pelaksanaan program pembangunan tersebut lebih memperjelas adanya perbedaan perbedaan di dalam mengemukakan konsep pelaksanaan program pembangunan yang disebabkan karena masing-masing pakar menggunakan sudut pandang dan kerangka acuan untuk menyinggung pelaksanaan program pembangunan (Mira, 2004:85).

c. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi sudah menjadi bahasa yang umum dan sangat dikenal sejak dulu, partisipasi tiba-tiba menjadi sesuatu yang harus didorong. Penyelenggara pemerintahan serta merta disadarkan bahwa pembangunan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah setelah dana pemerintah menjadi lebih terbatas jika dibandingkan dengan keinginan membangun.

Dalam penyelenggaran pembangunan, mau tidak mau harus melibatkan partisipasi aktif segenap masyarakat, baik dalam memikul beban pembangunan, mulai dari keinginan/kebutuhan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan

pembangunan, menerima hasil pembangunan, pertanggung jawaban atas pembangunan. Paradigma yang demikian sejalan dengan pendapat Jamieson (dalam Mikkelsen, 1999 : 63) yang menegaskan bahwa : munculnya paradigma pembangunan partisipatoris mengindikasikan adanya dua perspektif: *yang pertama*, pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan program atau kegiatan yang akan mewarnai hidup mereka, sehingga dengan demikian dapatlah dijamin bahwa persepsi setempat, pola sikap dan pola berpikir serta nilai-nilai dan pengetahuannya ikut dipertimbangkan secara penuh. *Yang kedua* adalah membuat umpan balik (*feedback*) yang pada hakikatnya merupakan bagian tak terlepaskan dari kegiatan pembangunan”.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan adanya tiga gagasan penting dari partisipasi yaitu keterlibatan mental dan emosional, motivasi dan kontribusi yaitu kesempatan untuk menyalurkan inisiatif dan kreativitasnya, dan tanggung jawab dalam aktivitas kelompok. Ini merupakan proses sosial yang melaluinya orang-orang menjadi terlibat sendiri dalam organisasi dan mau mewujudkan keberhasilannya.

Mengacu kepada beberapa pengertian partisipasi tersebut, terbuka kemungkinan bagi setiap anggota masyarakat untuk memberikan kontribusi atau sumbangan demi terbinanya dan terwujudnya masa depan yang lebih baik.

Partisipasi merupakan hak dan kewajiban seseorang warga negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatifnya dan kreativitasnya dalam rapat kelompok masyarakat atau pertemuan-pertemuan, baik yang bersifat formal maupun informal.

Dalam rapat-rapat kelompok tersebut akan saling memberi informasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga terjalin komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan antara sesama anggota masyarakat. Dalam proses pembangunan, partisipasi berfungsi sebagai masukan dan keluaran.

Pengertian partisipasi masyarakat dalam Program ADK adalah kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai, termasuk didalamnya kegiatan seseorang atau kelompok untuk mendukung berhasilnya program sesuai dengan kemampuannya. Dukungan masyarakat dapat berupa dukungan pemikiran, sumbangan tenaga, dana, material dalam tahap-tahap pembangunan suatu kegiatan. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ADK diharapkan masyarakat memperoleh manfaat untuk peningkatan kesejahteraan kehidupannya.

Tahap-tahap partisipasi masyarakat dalam penelitian ini disesuaikan dengan mekanisme kerja pelaksanaan program pembangunan. Terdiri dari: (1) tahap perencanaan kegiatan; (2) tahap pelaksanaan kegiatan; (3) tahap pemanfaatan hasil; (4) tahap penilaian kegiatan. Hal ini sesuai dengan bentuk (tahap) partisipasi yang dikemukakan oleh Ndraha (1987 : 103-104), sebagai berikut :

1. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.
2. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.

3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana). Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditumbuhkan sedini mungkin di dalam masyarakat. Partisipasi ini disebut juga partisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan politik yang menyangkut nasib mereka, dan partisipasi dalam hal yang bersifat teknis.
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah proses dimana prioritas-prioritas pembangunan dipilih dan dituangkan dalam program untuk mengembangkan masyarakat itu sendiri, sehingga dengan demikian masyarakat mengalami latihan untuk menentukan masa depannya sendiri secara demokratis.

Partisipasi dalam kegiatan pelaksanaan putusan yang telah ditetapkan, bentuknya dapat diketahui dari jumlah (banyaknya) yang aktif berpartisipasi, dapat berupa tenaga, material, dana. Tetapi juga partisipasi langsung atau tidak langsung, temporer atau terus menerus.

Partisipasi pemanfaatan hasil selain dapat dilihat masyarakat menggunakan hasil pembangunan, juga diketahui dari dampak hasil pembangunan terhadap lingkungan hidup, meningkatnya kemudahan mobilitas sosial bagi masyarakat.

Partisipasi dalam bentuk keikutsertaan, menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya. Partisipasi ini merupakan bagian *social control*.

Dalam kehidupan masyarakat dapat menciptakan rasa kebersamaan, solidaritas kelompok dan kesinambungan (kontinuitas) pembangunan.

Efektivitas pelaksanaan kerja suatu organisasi tercermin dari tingkat partisipasi masyarakat dan kepuasan kerja yang dicapai. Keberhasilan suatu organisasi dalam memberikan kepuasan tercermin dari adanya kegiatan mutu pelayanan yang diterapkan dengan baik sesuai dengan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Keberhasilan organisasi merupakan kepuasan dari orang-orang yang terlibat dalam organisasi untuk memenuhi tujuannya. Mengembangkan suatu kepuasan kerja yaitu mewujudkan berbagai hal yang berkaitan dengan terpenuhinya harapan, keinginan dan kebutuhan dari kegiatan organisasi (Steers, 1985:128).

Handoko (2004:310), mengatakan bahwa perspektif pelaksanaan program pembangunan meliputi mutu pelayanan, tepat waktu dan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Proses internal mendasarkan diri pada kepercayaan bahwa para individu harus mempunyai kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, mempertahankan integritas dan keunikan mereka dalam tatanan organisasi. Selain itu disebutkan bahwa model didasarkan pada suatu rangkaian prinsip-prinsip normatif yang mengarahkan cara organisasi seharusnya berfungsi untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan manusia agar dapat mencapai potensi maksimum.

Pelaksanaan program pembangunan digambarkan sebagai hasil guna yang diakibatkan usaha yang telah dilakukan secara riil, sedangkan efesiensi menggambarkan tingkat sumber daya berupa manusia, dana dan alam yang

diperlukan untuk mendapatkan output tertentu. Teori pelaksanaan program pembangunan yang diperkenalkan oleh Mireless dalam Thoha (2008:57) menyatakan bahwa pelaksanaan program pembangunan disusun berdasarkan postula-postula (dalil-dalil) yang melibatkan konsep mengenai mutu pelayanan, tepat waktu dan mencapai sasaran.

Ketiga dalil tersebut di atas menjadi prinsip dari suatu kegiatan pelaksanaan program pembangunan yang harus dikembangkan oleh setiap pengembang pemberdayaan masyarakat. Mukhlis (2003:67) menyatakan bahwa setiap kegiatan pelaksanaan program pembangunan harus bermutu dalam pelayanan. Mutu pelayanan disesuaikan dengan akses bukti fisik, akses kemampupahaman, akses kehandalan, akses respon dan jaminan.

Selain itu, suatu pengembangan pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi terpadu, senantiasa diukur berdasarkan pemanfaatan timing atau waktu. Salah satu akses dari pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi terpadu adalah tepat waktu. Mukhlis (2003:69) menyatakan bahwa kegiatan pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu adalah kegiatan pembangunan yang memiliki jadwal kerja, jam kerja, waktu kerja dan efisiensi kerja, sehingga proses program tersebut berjalan secara terencana, terarah dan tepat waktu.

Memahami pentingnya program pelaksanaan kerja tidak terlepas dari adanya kegiatan pembangunan tepat sasaran. Ciri dari kegiatan program pembangunan yang tepat sasaran adalah kegiatan yang tersosialisasikan sesuai dengan fungsi manajemen. Handoko (2004:87) menyatakan bahwa pembangunan

adalah suatu proses yang menerapkan kegiatan fungsi manajemen yang terencana, terlaksana, terorganisir dan terawasi.

Secara singkat menurut konsep pelaksanaan program pembangunan dapat dinyatakan bahwa terlaksananya suatu kegiatan yang menghasilkan mutu pelayanan, tepat waktu dalam pelayanan dan memuaskan dalam memberikan pelayanan, sehingga dapat diasumsikan bahwa mutu pelayanan adalah input, tepat waktu dalam pelayanan adalah proses, dan sasaran adalah output (The Liang Gie, 1987:30).

Pengertian efektifitas juga dikemukakan oleh The Liang Gie (1987:37) adalah perbandingan yang terbaik antara input dan output, antara keuntungan dan biaya (antara hasil pelaksanaan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil maksimum yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas, dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan dengan apa yang harus diselesaikan.

Pengertian lain mengenai pelaksanaan program pembangunan dikemukakan oleh Siagian (1997 : 20) adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan barang atau jasa dengan mutu tepat waktu. Dari pengertian tersebut nampak bahwa pelaksanaan program pembangunan sebagai orientasi kerja menyoroti empat hal yaitu :

1. Sumber daya, dana sarana dan prasarana yang dapat digunakan sudah ditentukan dan dibatasi
2. Jumlah dan mutu barang atau jasa yang harus dihasilkan telah ditentukan

3. Batas waktu untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut sudah ditetapkan
4. Tata cara yang harus ditempuh untuk menyelesaikan tugas sudah dirumuskan.

Lubis dan Husaini (1987 : 56) mengemukakan bahwa terdapat beberapa pendekatan dalam mengukur pelaksanaan program pembangunan yaitu :

1. Pendekatan Sasaran (*goal approach*), dalam pengukuran pelaksanaan program pembangunan memusatkan perhatian terhadap aspek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan output yang direncanakan. Pendekatan sasaran dalam pengukuran pelaksanaan program pembangunan dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut.
2. Pendekatan sumber (*system resource approach*). Pendekatan sumber mengukur pelaksanaan program pembangunan melalui keberhasilan organisasi dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkan, dan memelihara keadaan sistim organisasi agar bisa menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistim organisasi terhadap lingkungan.
3. Pendekatan Proses (*internal process approach*). Pendekatan proses menganggap pelaksanaan program pembangunan sebagai efisiensi dan kondisi (kesehatan) dari organisasi internal. Pada organisasi yang efektif proses internal berjalan dengan lancar, karyawan bekerja dengan kegembiraan serta kepuasan yang tinggi, kegiatan masing-masing bagian terkoordinasi secara baik dengan produktivitas yang tinggi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan organisasi dan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan organisasi. Pendekatan proses umumnya digunakan oleh penganut pendekatan neo klasik (*human relation*) dalam teori organisasi yang terutama meneliti hubungan antara pelaksanaan program pembangunan dengan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi.
4. Pendekatan Integratif (*integrative approach*). Yaitu suatu pendekatan gabungan yang mencakup input, proses dan output.

Buckley (Thoha, 2008:123) menyebutkan sistim terbuka ini menyesuaikan pada lingkungan dengan cara melakukan perubahan-perubahan susunan dan proses dari komponen-komponen didalam organisasi itu sendiri. Sedangkan Thoha (2008:123) mengemukakan bahwa sistim terbuka mempunyai interaksi

hubungan yang berkelanjutan (*continual interactions*) dengan lingkungan dan mencapai suatu tingkat dinamika tertentu atau keseimbangan yang dinamis sementara sistem ini masih mempunyai kemampuan yang berlanjut untuk melangsungkan kerja dan melakukan transformasi ke pihak lain.

Bekaitan dengan hal tersebut, Nigro (Sedarmayanti, 1999 : 25)

mengutarakan karakteristik organisasi sistem terbuka adalah sebagai berikut :

1. Secara seimbang mencari dan memerlukan sumber-sumber (*inputs*) dalam bentuk material dan kemanusiaan.
2. Organisasi mentransformasikan input dalam bentuk hasil-hasil seperti barang-barang dan jasa pelayanan melalui proses teknologi dan sosial.
3. Organisasi sistem terbuka mengirimkan hasil produksinya ke pihak luar yaitu lingkungan, dan hasil-hasil tersebut merupakan bahan masukan bagi organisasi kelompok-kelompok atau individu-individu lainnya.
4. Struktur organisasi dikembangkan disekitar kegiatan-kegiatan yang telah mempola dalam bentuk ajeg, yaitu dalam putaran masukan, proses dan keluaran.
5. Organisasi hidup dengan mengembangkan suatu mekanisme yang beragam untuk meneliti, menyimpan dan mengalokasikan sumber-sumber yang langka secara efisien.
6. Organisasi sistem terbuka lebih memperhatikan tujuan-tujuan organisasi dengan mengontrol kegiatan-kegiatan, baik didalam maupun diluar organisasi, karena adanya umpan balik berupa informasi mengenai keadaan lingkungan, pelaksanaan organisasi dan kegiatan-kegiatan kedalam.
7. Adanya keseimbangan dan kestabilan antara faktor-faktor didalam dan diluar organisasi yang dicapai melalui adaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan.
8. Pengembangan struktural dan spesialisasi tugas yang dilakukan setiap waktu merupakan jawaban-jawaban umum yang sistematik dalam rangka mencari sumber-sumber adaptasi.

Konsekuensi dari sistem terbuka menurut Daft (Sedarmayanti, 1999:57),

agar organisasi tetap eksis, maka harus mampu berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan, serta secara kontinyu melakukan perubahan sejalan dengan

perubahan yang terjadi dalam lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan mutu pelayanan, tepat waktu dan sasaran.

Model pelaksanaan, memfokuskan pada proses pengolahan informasi dan pembuatan keputusan dalam organisasi. Cameron dan Whetten (Azhar, 2004:91) menemukan bahwa efektifitas proses internal menurut persepsi partisipan dalam simulasi organisasi dianggap sebagai suatu yang penting dalam seluruh tahap perkembangan organisasi yang mengarah kepada mutu pelayanan, tepat waktu dan sasaran.

Steers (Azhar, 2004:91) mengatakan bahwa pola dan proses komunikasi merupakan suatu alat yang penting untuk koordinasi dan untuk pengarahan kegiatan karyawan untuk menunjukkan mutu pelayanan, ketepatan waktu dan sasaran organisasi.

Handoko (2004:310), mengatakan bahwa perspektif proses internal mendasarkan diri pada kepercayaan bahwa para individu harus mempunyai kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, mempertahankan integritas dan keunikan mereka dalam tatanan organisasi. Selain itu disebutkan bahwa model didasarkan pada suatu rangkaian prinsip-prinsip normatif yang mengarahkan cara organisasi seharusnya berfungsi untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan manusia agar dapat mencapai potensi maksimum sesuai dengan mutu pelayanan, ketepatan waktu dan sasaran organisasi.

Cameron dalam Handoko (2004:311) mengemukakan model ini paling tepat bila berbagai proses organisasi yang dievaluasi sangat terkait dengan tugas-tugas pokok organisasi yang sesuai dengan pelaksanaan program pembangunan

yang pada intinya berfokus kepada mutu pelayanan, ketepatan waktu dan sasaran organisasi.

Indrawijaya (1989:25) mengatakan bahwa pelaksanaan program pembangunan dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha mencapai mutu pelayanan, ketepatan waktu dan sasaran organisasi. Dalam suatu organisasi, baik organisasi yang berskala besar maupun kecil pelaksanaan program pembangunan merupakan konsep yang perlu diperhatikan karena pelaksanaan program pembangunan dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam menerapkan mutu pelayanan, ketepatan waktu dan sasaran organisasi (Lubis dan Huseini, 1987 : 55).

Pelaksanaan program pembangunan juga digambarkan sebagai hasil guna yang diakibatkan usaha yang telah dilakukan secara riil dalam bentuk mutu pelayanan, ketepatan waktu dan sasaran organisasi (Papasi, 1982 : 34).

Steers (1985:71) mengemukakan bahwa beberapa variabel yang mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu desentralisasi pengambilan keputusan, spesialisasi fungsi, formalisasi, rentang kendali, ukuran organisasi dan ukuran unit kerja yang sesuai dengan pelaksanaan program pembangunan yang didalamnya mencakup mutu pelayanan, ketepatan waktu dan sasaran organisasi.

Scuman (dalam Papasi, 1994 :58) mengemukakan bahwa kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur pelaksanaan pembangunan atau pelaksanaan suatu program pemerintah dapat dilihat dari segi upaya, penagruh, hasil yang memadai, penggunaan biaya yang efektif dan proses dalam mutu pelayanan, ketepatan waktu dan sasaran organisasi.

Penulis mengadopsi konsep pelaksanaan program pembangunan menurut Scuman dalam penelitian ini dengan pendekatan proses dengan komponen-komponen komunikasi, peranan pendamping, partisipasi masyarakat dan kemampuan kelompok sasaran. Suatu kebijakan pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk bantuan program pembangunan dengan sasaran kepada masyarakat tentunya tidak artinya apabila tidak ditindaklanjuti dalam suatu bentuk upaya melaksanakan segala prosedur yang telah digariskan dan berupaya untuk terus mengembangkan ide atau gagasan yang lebih baik dan positif. Lahirnya gagasan tentang suatu program pembangunan acapkali muncul dari atas (*top down*), sehingga terkadang kebijakan/program tersebut sampai kepada implementasinya tidak menyentuh kepada kelompok sasaran yang pada akhirnya program ini tidak berarti.

Daya kerja dari suatu program pembangunan adalah fungsi kesesuaian antara mereka yang dibantu, program dan organisasi yang membantu. Dalam istilah yang lebih khusus program pembangunan akan gagal memajukan kesejahteraan suatu kelompok jika tidak ada hubungan yang erat antara kebutuhan-kebutuhan para penerima bantuan dengan outcome program, kemampuan dan pengungkapan kebutuhan oleh pihak penerima dan proses pengambilan keputusan dari organisasi pembantu (Korten, 1988).

Kaitannya dengan program ADK sebagai salah satu program pembangunan yang telah dirumuskan secara matang dengan mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan terhadap masyarakat. Sebagai suatu program yang berkelanjutan maka ADK mengacu pada petunjuk teknis yang diatur dalam

peraturan Bupati guna menciptakan suatu rencana kerja yang matang dan terprogram sehingga para pelaksana dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan mutu pelayanan, ketepatan waktu dan sasaran organisasi.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas

Tolak ukur yang digunakan dalam menetapkan keberhasilan berbagai organisasi (Steers, 1985) yaitu : Efektivitas secara umum, kualitas, produktivitas, kesiapan, efisiensi, keuntungan, pertumbuhan , pemanfaatan lingkungan, stabilitas, rasio jumlah pegawai yang keluar, kemangkiran, kecelakaan, moral, motivasi, kepuasan, internasionalisasi, konflik dan kekompakan, fleksibilitas, dan evaluasi dari pihak luar.

Berkaitan dengan keberhasilan organisasi, seperti yang dikemukakan oleh Bryant dan White (1982:142) : Pertama, program-program harus diseleksi dalam hubungan dengan kebutuhan-kebutuhan programnya; program harus dirancang untuk mendorong agar program dapat memanfaatkan pelajaran yang ada, dan program-program itu harus dievaluasi dalam kaitan dengan keefektifannya memacu kemampuan organisasi dalam menanggapi prakarsa-prakarsa lokal. Kriteria yang paling sering digunakan untuk memberikan penilaian positif atau negatif pada suatu program ialah seberapa dekat hasil program itu dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, dan apakah pencapaian itu dilaksanakan secara efisien atau tidak, apakah sumber-sumber daya dipergunakan secara lebih baik daripada di tempat lain.

Kedua, baik organisasi program maupun organisasi pelaksana haruslah merupakan learning organization yang terbuka terhadap umpan balik dari

lingkungan, memproses informasi itu dan terus menerus memperbaharui pendekatan-pendekatannya.

Ketiga menyangkut struktur insentif bagi perilaku dalam suatu program. Apakah perilaku-perilaku yang dirangsang oleh insentif itu selaras dengan tujuan program. Keempat, penting untuk memikirkan dan mengevaluasi efisiensi serta keadilan yang ada dalam program itu sendiri, tingkat imbalan investasi, dan dampak serta distribusi manfaat-manfaat program. Tingkat pemanfaatan suatu program oleh penduduk setempat berkaitan dengan perasaan mereka apakah program itu sungguh-sungguh memecahkan masalah mereka dan keselarasan antara program-program itu dengan upaya mereka sendiri.

Organisasi dicirikan oleh perilakunya yang terarah pada tujuan. Tujuan dan sasaran organisasi dapat dicapai lebih efisien dan efektif melalui tindakan-tindakan individu dan kelompok yang diselenggarakan dengan persetujuan bersama.

Organisasi menurut Gibson (1997:7) adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan. Sebagai suatu organisasi, maka Pemerintah Kelurahan dituntut melaksanakan tugasnya secara efektif. Melalui berbagai program, pemerintah melaksanakan tugasnya, salah satunya Alokasi dana Kelurahan.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa keberhasilan dari suatu organisasi dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang dibuat berdasarkan kebijaksanaan organisasi. Keberhasilan program dapat dilihat

sejauhmana program tersebut melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasaran.

Gibson (1997:164) mendefinisikan tujuan sebagai keterangan tentang hasil yang dapat diukur yang dicoba seseorang untuk mencapainya. Tujuan membantu seseorang menyusun suatu rencana yang diubah menjadi harapan dan keinginan menjadi kenyataan.

Sedarmayanti (1999:57) merumuskan produktivitas sebagai berikut: Produktivitas adalah perbandingan antara hasil (*output*) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan masukan (*input*). Jika produktivitas naik ini hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi (waktu-bahan-tenaga) dan sistem kerja, teknik produksi dan adanya peningkatan ketrampilan dari tenaga kerjanya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa produktivitas merupakan perbandingan antara keluaran dan masukan serta mengutarakan cara pemanfaatan terhadap sumber-sumber dalam memproduksi suatu barang dan jasa.

Kemudian indikator lain adalah kepuasan masyarakat. Tingkat kepuasan dapat saja diperoleh dari imbalan yang diberikan, baik yang berupa materi maupun yang berupa non materi, tetapi dapat juga dari hasil kerja yang dilakukan. Kepuasan seperti itu justru nilainya lebih tinggi karena timbul dari dalam diri pribadi yang merasa puas dan bangga karena telah berhasil melaksanakan tugas dengan baik.

Pembahasan mengenai kepuasan perlu didahului oleh penegasan bahwa masalah kepuasan bukanlah hal yang sederhana, baik dalam arti konsepnya maupun dalam arti analisisnya. Hal ini karena kepuasan merupakan suatu cara pandang seseorang, baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif tentang sesuatu hal.

Oliver (dalam Supranto, 1997:212) mengemukakan bahwa kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja/hasil yang dirasakan dengan harapannya. Jadi tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan.

Steers (1985:48) mengemukakan bahwa efektivitas organisasi dalam pelaksanaan program pembangunan ditentukan oleh adanya faktor pendukung berupa peranan pendamping pembangunan, partisipasi masyarakat dan kemampuan kelompok. Hal ini merupakan tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi.

Starman (2000:95) menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa pandangan tentang pelaksanaan program pembangunan memerlukan adanya faktor yang mendukung terselenggaranya suatu program kegiatan yang bermutu, tepat waktu dan tepat sasaran dengan mengaktifkan secara efektif faktor pendukung berupa: (i) peranan pendamping, (ii) partisipasi masyarakat, dan (iii) kemampuan kelompok. Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

a. Peranan Pendamping

Program pembangunan merupakan suatu kebijakan untuk menemukan paradigma masyarakat lokal untuk memberdayakan masyarakat miskin. Pergeseran paradigma pembangunan dari manajemen *top down* ke *people centered development* dengan manajemen pengelolaan masyarakat lokal membutuhkan pendampingan dari orang lain untuk mengembangkan dirinya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan program pembangunan peranan para pendamping menjadi sangat penting.

Ismawan (1997:71) mengemukakan beberapa peranan pendamping dalam pengembangan kelompok sasaran antara lain :

1. Membantu kelompok sasaran untuk memperkuat dinamika intrern dengan memantapkan aspek keorganisasian
2. Membantu mengidentifikasi berbagai kemungkinan atau potensi lingkungan terdekat yang dapat dieklola sebagai usaha produktif
3. Sebagai penghubung antara kelompok sasaran dengan berbagai potensi yang termanfaatkan dari luar.

Hagul (1992:36) mengemukakan beberapa peranan pendamping dalam pengembangan masyarakat yaitu :

1. Fasilitator atau katalisator yaitu mereka harus tinggal disela-sela kelompok sasaran menyertai proses perkembangan kelompok, membantu memecahkan masalah dan ikut menentukan alternatif pemecahannya,
2. Sebagai pelatih dan pendidik yaitu mencarikan dan meyalurkan informasi-informasi dan pengalaman dari luar kedalam kelompok melalui berbagai metode belajar mengajar,
3. Pemupuk modal yaitu mendorong upaya penghematan, menabung, usaha produktif dan lain-lain,
4. Menyelenggarakan proyek stimulan untuk mendorong kemandirian kelompok sasaran

b. Kemampuan Masyarakat Kelurahan (kelompok sasaran)

Kelompok sasaran (*target group*) adalah orang, masyarakat atau organisasi yang kepada mereka suatu kebijakan atau program diharapkan memberikan akibat (Dunn, 2000:66). Masyarakat selaku kelompok sasaran diharapkan menjadi pihak yang menikmati hasil suatu program, harus ditentukan secara jelas guna memobilisasi sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok masyarakat.

Kegiatan penentuan kelompok sasaran program ADK dilakukan pada tahap perencanaan karena besarnya alokasi dana bantuan ADK kepada kelurahan didasarkan pada jumlah masyarakat penerima bantuan dan jenis kegiatan yang akan dilakukan setelah melalui musyawarah tingkat kelurahan.

Dari gambaran tersebut maka dalam penentuan jenis kegiatan dan pengalokasian bantuan program pada masyarakat di kelurahan ditentukan dalam rapat di kecamatan yang dihadiri seluruh perwakilan desa/kelurahan setelah ada rekomendasi dari tim verifikasi yang dikoordinir oleh fasilitator kecamatan.

Dalam implementasi program pembangunan kelompok sasaran adalah masyarakat yang bermukim di Kelurahan yaitu kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah dan terbatas kemampuan serta aksesnya dalam mendapatkan pelayanan, prasarana dan permodalan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya atau menghadapi masalah khusus dan mendesak yang segera memerlukan penanganan dan bantuan.

Kemampuan masyarakat miskin yang terbatas dalam melaksanakan program pembangunan salah satunya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan sarana yang teramat penting dalam pembangunan termasuk pembangunan kelurahan.

Dengan demikian kemampuan masyarakat miskin menjadi salah satu fenomena apakah masyarakat miskin dapat melaksanakan program pembangunan secara simultan. Karena ketidakberdayaan kelompok miskin ini antara lain dicerminkan dengan kemudahan yang dimiliki oleh golongan masyarakat lain yang lebih mampu dan lebih kuat untuk memperoleh, mengatur dan membelokkan manfaat atau hasil-hasil pembangunan serta pelayanan pemerintah yang diperuntukkan bagi mereka yang kekurangan.

B. Defenisi Operasional Variabel

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai variabel yang diamati berikut indikatornya untuk menyamakan persepsi dan memudahkan dalam melakukan pengukuran indikator per variabel. Berikut ini dikemukakan defenisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

Efektivitas program ADK adalah keberhasilan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh kelurahan atas pengelolaan alokasi dana kelurahan untuk kegiatan pembangunan. Untuk mengetahui efktivitas program ADK, maka akan ditelusuri melalui Indikator kemampuan menyesuaikan diri dalam memberikan mutu pelayanan, produktivitas organisasi yang dilaksanakan tepat waktu dimana didalamnya terdapat faktor-faktor yang mendukung

produktivitas tersebut yaitu peranan pendampingan, partisipasi masyarakat dan kemampuan kelompok serta kepuasan kerja yang tepat sasaran.

- a. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan adalah Kemampuan organisasi kelurahan dalam meningkatkan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya
- b. Kemampuan lembaga kemasyarakatan adalah kemampuan lembaga pendamping pemerintah dalam mengoptimalkan efektivitas kerja program yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan.
- c. Partisipasi masyarakat adalah pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kelurahan yang mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

C. Kerangka Pikir

Pelaksanaan proses pemerintahan dan pembangunan di Indonesia, pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Kedudukan yang strategis ini berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah dalam meningkatkan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Wujud pelayanan publik tersebut salah satunya adalah program Alokasi Dana Kelurahan (ADK).

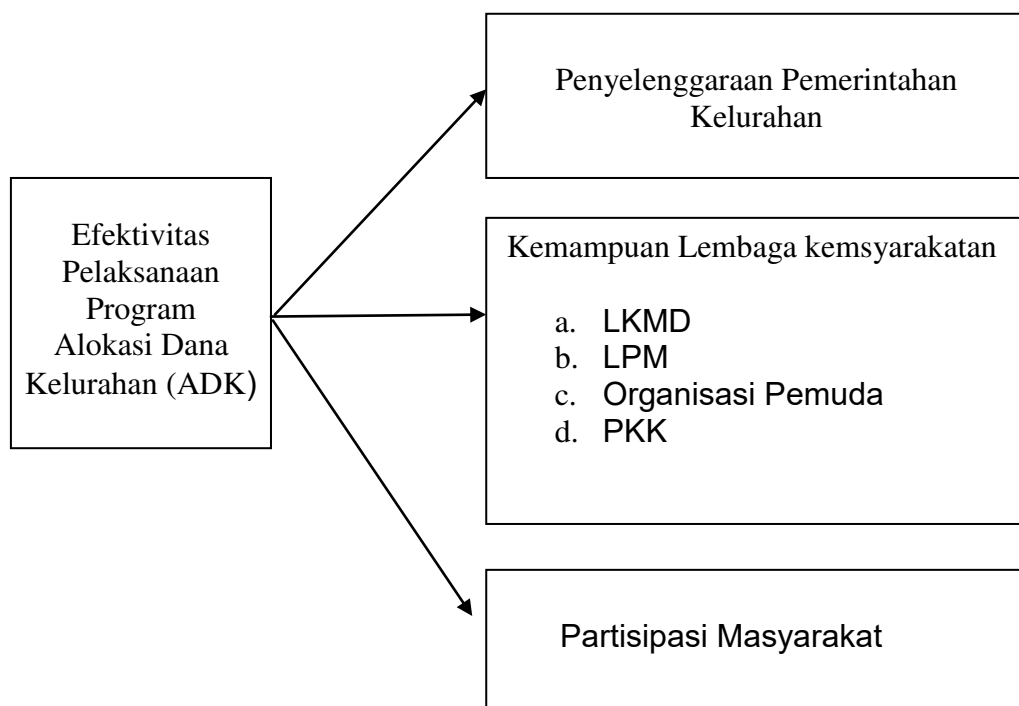
ADK ini dilaksanakan sebagai program untuk meningkatkan kegiatan pembangunan kemasyarakatan yang berkaitan dengan kegiatan program pembangunan yang disebut "Program ADK". Program ini diterapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, tepat waktu dalam

pelaksanaannya dan memiliki sasaran organisasi yang bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan program pemerintah.

Efektivitas pelaksanaan program pemerintah atas kegiatan program ADK, membutuhkan adanya faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan program ADK tersebut. Faktor tersebut berupa faktor pendampingan, faktor partisipasi masyarakat dan faktor kemampuan kelompok dalam menjalankan pelayanannya, sehingga efektivitas terwujud.

Wujud dari efektivitas pelaksanaan program pemerintah tercermin dari adanya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, kemampuan lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat. Lebih jelasnya ditunjukkan kerangka pikir di bawah ini:

Gambar 1. Kerangka Pikir



D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pendahuluan dan identifikasi masalah, penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam efektivitas pelaksanaan program ADK yang dilaksanakan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa?
2. Sejauh mana kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan program ADK yang dilaksanakan di kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa?
3. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pencapaian efektivitas pelaksanaan program ADK yang dilaksanakan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa?